

Abstrak

Skripsi ini berjudul *Relasi Kuasa dan Agenda Setting dalam Kebijakan Kebencanaan Potensi Pergerakan Sesar Lembang di Bandung, Provinsi Jawa Barat*. Kebijakan kebencanaan menyebutkan bahwa Kawasan Bandung Utara memiliki sesar Lembang yang rentan bergeser dan menimbulkan bencana besar seperti gempa megathrust. Namun demikian pembangunan berbagai jenis infrastruktur di Kawasan Bandung Utara, terutama untuk tujuan rekreasi, sangatlah masif. Mereka mengabaikan kebijakan yang menyampaikan mitigasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan relasi kuasa dan agenda setting dalam kebijakan kebencanaan di Bandung Utara yang berpusat pada Sesar Lembang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara. Untuk menentukan informan, penelitian ini memakai dua teknik sampling, yaitu purposive sampling dan snowball sampling, walaupun yang benar-benar bekerja hanyalah snowball sampling. Sementara Data sekunder dikumpulkan dengan penelaahan dokumen, observasi melalui Google Maps dan pengumpulan berita dari laman berita mainstream.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentuk sebuah kebijakan lahir dari instansi pemangku kebijakan pemerintahan daerah yang menaruh perhatian terhadap isu sesar Lembang. Mereka menyampaikikan informasi tentang potensi bencana dengan agenda setting tertentu. Selain itu, terdapat hubungan pengaruh yang timpang antara pengambil kebijakan kebencanaan dengan masyarakat. Ketimpangan itu, terutama karena ketiadaan payung hukum yang lebih jelas dan spesifik. Kemudian formulasi dan pelaksanaan dari kebijakan kebencanaan tentang sesar Lembang ini masih bersifat sporadis dan tidak terstruktur.

Kata Kunci: Sesar Lembang, Formulasi Kebijakan, Mitigasi Bencana Alam, Politik Kebencanaan

Abstract

This thesis is titled *Power Relations and Agenda Setting in Disaster Policy for the Lembang Fault Movement Potential in Bandung, West Java Province*. Disaster policy states that North Bandung Region has Lembang fault that is prone to shifting and causing major disasters just like megathrust earthquake. However, the construction of various types of infrastructure in North Bandung Region, especially for recreational purposes, is very massive. They are ignoring the policy that conveys this mitigation. This study aims to describe the power relations and agenda setting in disaster policy in North Bandung, which is centered on the Lembang Fault.

The method researcher used in this study is qualitative approach that used two types of data: primary and secondary. Primary data were collected through interviews. To determine informants, this study used two sampling techniques, purposive sampling and snowball sampling, although only snowball sampling that was truly effective. Meanwhile, secondary data were collected through document review, observation via Google Maps, and news gathering from mainstream news websites.

The results of the study show that a policy is formed by local government policy-making institutions that are concerned to the issue about Lembang fault. They convey information about the disaster potential with a certain agenda setting. Furthermore, there is an unbalanced relationship of influence between disaster policy makers and the community. This imbalance is mainly due to the absence of a clearer and more specific legal framework, and this problem lead to the formulation and implementation of this Lembang fault disaster policy are still sporadic and unstructured.

Keywords: Lembang Fault, Policy Formulation, Natural Disaster Mitigation, Disaster Politics